**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND OLEH
KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT KAPUR KOTA DUMAI**

Oleh: Warni Susila

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH

Pembimbing II: Ferawati, SH.,MH

Alamat: Jl. Sukamaju Kel.Kampung Baru Kota Dumai

Email: warnisusila01@gmail.com / Telepon: 085271035738

ABSTRACT

Gambling is regulated in Article 303 paragraph (1) the Criminal Code with threats for preparatos namely imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 25,000.000,00 (twenty-five million rupiah). However, in reality enforcement regarding gambling is still not optimal, this can be seen from the large number of people who freely acces or play online gambling, especially higgs domino island which occured in Bukit Kapur, Dumai City. This aims to: first, to determine law enforcement against erpetrators of criminal acts of online gambling on higgs domino island by the Bukit Kapur sector police. Second, tooutline the obstacles in law enforcement against criminal acts of higgs domino island gambling in the jurisdiction of the Bukit Kapur Sector Police. Third, to outline the efforts made by the police to overcome obstacles in enforcing criminal acts of higgs domino island online gambling.

This type of research can be classified as sociological legal research, because in this research it is carried out by looking at the effect of the enactment of positive law on people's lives. This research was conducted at the Bukit Kapur Police, Dumai City. In this studet, the data sources used were primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviewes and literature review.

From the results of the research conductes, it can be concluded that law enforcement carried out by the Bukit Kapur Sector Police in the City of Dumai has not been fully effective, this is influenced by several factors, namely the legal factors themselves, law enforcers, facilities and infrstrusture, comunity dan cultural factors. Obstacles in enforcing the higgs domino island online gambling law faced by the Bukit Kapur Police include factors, law enforcers, facilitaties and infrastructure and the community. The efforts made by the police are conducting outreach, cooperating with the community, taking strict action against online gambling actors.

Keywords: Law Enforcement – Crime – Online Gambling

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi dari berbagai dunia yang begitu pesat, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Banyak kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana atau fasilitas melakukan kejahatan, misalnya pencurian rekening, pemalsuan data, penipuan, pembajakan, pornografi, perjudian, pencemaran nama baik dan lain-lain. Inti dari tindak pidana yang terkandung dalam jaringan internet di atas, yang akan dibahas secara rinci dan deskriptif adalah tindak pidana perjudian melalui situs internet atau perjudian online, terutama pada aplikasi *Higgs Domino Island*.

perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih

atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya”.²

Peraturan atas perjudian pada awalnya diatur dalam Pasal 303 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.90.000. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 2 ayat (1) memuat ancaman hukuman atas tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat (1) KUHP diubah menjadi hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000. Kemudian mengubah Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dengan ancaman diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000. Kemudian Pasal 303 bis ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000.

Pengaturan judi online ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan di dalam Pasal 45 ayat (2) menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mengadministrasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 14.

² Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2016, hlm. 14

elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda Rp. 1.000.000.000”.

Peneliti melakukan penelitian pada Kantor Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai pada tanggal 20 Desember 2022 terkait pelaporan kasus kejahatan perjudian online dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Secara keseluruhan ada 2 kasus yang tercatat, untuk lebih jelasnya peneliti mamaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Kasus Perjudian Online

No	Tahun	Lapor	Selesai
1.	2020	0	0
2.	2021	0	0
3.	2022	2	2
	Jumlah	2	2

Sumber: Data Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai

Berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa tidak adanya penegakan hukum tindak pidana perjudian online *higgs domino island* oleh Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai, hal tersebut ditunjukkan dengan ketidakseimbangan antara maraknya perjudian online yang terjadi di lapangan dengan kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian. Terutama pada perjudian online *higgs domino island* karena jumlah kasus yang ditangani diatas hanya kasus perjudian togel online.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang mana adanya permasalahan mengenai penegakan hukum judi online *higgs domino island* dimana tidak berjalannya penegakan

hukum itu sendiri, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE *HIGGS DOMINO ISLAND* OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT KAPUR KOTA DUMAI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online *higgs domino Island* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online *higgs domino island* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana perjudian online *higgs domino island* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perjudian online *higgs domino island* oleh Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai.
- b. Untuk menguraikan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online *higgs domino island* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai.

- c. Untuk menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi hambatan tindak pidana perjudian online *higgs domino island* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum pidana. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai.
- c. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap-tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³ Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya mempunyai pengertian tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut selalu diungkapkan dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai kedamaian, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, dan lain-lain.⁴

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum terletak faktor-faktor yang mungkin memperngaruhinya, adapun faktor-faktor tersebut adalah:⁵

- a. Faktor Hukumnya Sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 5

⁴ *Ibid.* hlm. 6

⁵ *Ibid.* hlm. 8

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pelaksanaan Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaan.⁶

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda. Kendatipun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan hukum pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga terbagi menjadi tiga, yakni teori absolut, teori relatif dan teori

gabungan.⁷ Dalam penelitian ini, teori tujuan pidanaan yang dipilih oleh peneliti adalah teori relatif.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Bukunya yang berjudul *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* menjelaskan bahwa dalam teori relatif, memidana bukan berarti memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, akan tetapi hanya menjadi upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J. Andaenaes, teori relatif dapat juga disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of sosial defence*).⁸

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif adalah ada pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

E. Kerangka Konseptual

1. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. KENCANA. Semarang, 2014. Hlm. 119

⁷ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya AtmaPusaka. Yogyakarta. 2016, hlm. 37

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. P.T.ALUMNI. Bandung. 2010. Hlm. 16

menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁰
3. Perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹¹
4. Online adalah perangkat yang terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.¹²
5. *Higgs Domino Island* adalah sebuah aplikasi permainan atau game online yang dapat di unduh di *playstore* android, aplikasi ini adalah sebuah aplikasi permainan biasa yang bersifat hiburan dan dapat dimainkan di komputer atau *smartphone*.¹³

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Hlm. 8

¹⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 100

¹¹ Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Pidana

¹² <https://kbbi.web.id/online>, diakses, tanggal, 5 januri 2023

¹³ Jupalman Welly Simbolon, "Aplikasi Game Online *High Domino Island* di Kalangan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dalam sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis, dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul di atas, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan objek yang hendak diteliti. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitian.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek

Mahasiswa Dalam Perspektif Patologi Sosial", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Vol. 5, No. 1 Juni 2022, hlm. 71.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 83

penelitian. Metode yang dipakai adalah metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau didapatkan oleh peneliti melalui observasi atau masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan. Contohnya seperti wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari bahan hukum kepustakaan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua orang atau lebih dengan satu tujuan dan biasanya berisi pertanyaan serta jawaban dari suatu pertanyaan.¹⁵

b. Kuisioner

Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada

umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

c. Kajian Kepustakaan

yaitu pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kajian keperustakaan bersumber pada buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan sejenisnya yang memiliki korelasi dengan pokok penelitian.

6. Analisis Data

Berdasarkan rumusan permasalahan yang peneliti masukkan dalam permasalahan ini, maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tau kata-kata verbal.¹⁶ Sumber data penelitian ini data kualitatif berbentuk deskriptif yang dapat diamati dan diperoleh dari berbagai sumber.¹⁷

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjudian Online Dilihat Dari Perspektif Patologi Sosial

1. Pengertian Patologi Sosial

Menurut Kartini Kartono patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” disebabkan

¹⁵ Indah Ria Sulistiyarini dan Nur Pratiwi Novianti, *Wawancara: Sebuah Metode Efektif untuk Memahami Perilaku Manusia*, CV.Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, Hlm. 7

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 139.

¹⁷ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 12

faktor-faktor sosial. Jadi ilmu tentang penyakit masyarakat atau patologi sosial mengacu pada perilaku manusia dalam hal apa pun yang dianggap tidak pantas, melanggar norma dan adat istiadat umum, atau tidak selaras dalam perilaku umum.¹⁸

2. Bentuk-Bentuk Penyakit Sosial

- a. Kriminalitas
- b. Perjudian
- c. Prostitusi
- d. Korupsi
- e. Narkoba.

3. Pengertian Perjudian Online Sebagai Penyakit Sosial

Perjudian online pada dasarnya adalah keseluruhan proses, baik itu bertaruh, berjudi, atau mengumpulkan uang melalui internet. Pemain harus melakukan deposit di awal sebelum dapat bermain judi online.¹⁹ Secara umum cara perjudian yang digunakan cenderung klasik yaitu bertaruh atau sekedar mencoba peruntungan dengan mengikuti bentuk perjudian yang telah ditentukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perjudian Online *Higgs Domino Island*

1. Pengertian Perjudian Online *Higgs Domino Island*

Higgs domino island adalah sebuah aplikasi game atau game online yang dapat dengan mudah diunduh dan

dimainkan dengan mudah pada smartphone atau handphone. Seperti halnya game atau game online pada umumnya, aplikasi ini memberikan banyak pilihan permainan kepada penggunanya untuk dipilih dan dinikmati. Namun, pada aplikasi *higgs domino island* ini mengharuskan pemainnya memiliki chip (dengan jumlah atau nilai tertentu) untuk menikmati berbagai permainan dalam program tersebut.²⁰

2. Macam-Macam Perjudian

Macam-macam perjudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Pasal 1 ayat (1).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online

Ada tiga unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:²¹

- a. Permainan atau perlombaan;
- b. Untung-Untungan;
- c. Ada Taruhan

4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Judi Online

²⁰ Jupalman Welly Simbolon, "Aplikasi Game Online *High Domino Island* di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Patologi Sosial", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Vol. 5, No. 1 Juni 2022, hlm.69

²¹ Wahyu Tris Haryadi, "Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Vol.13, No.2 Februari 2019, hlm. 124

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021. Hlm. V

¹⁹ Imelda Sonia Rumbay, "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online", *Lex Privatum*, Vol.XI, No. 5 Juni 2023. Hlm. 5

Dalam melakukan perjudian terhadap permainan *higgs domino island* menurut perspektif hukum pidana dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Pasal 303 KUHP. Jika perjudian dilakukan secara online, maka pelaku perjudian dapat dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi pihak yang menyelenggarakan permainan judi dapat dijerat dengan Pasal 303 KUHP.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi pidana Judi Online *Higgs Domino Island*

1. Pengertian Sanksi Pidana

Penggunaan kata sanksi dalam KUHP sering disebut dengan hukuman pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang menyertai penderitaan dan penyiksaan. Sanksi pidana pada hakikatnya merupakan bentuk rehabilitasi bagi pelaku kejahatan tersebut agar dapat kembali kedalam masyarakat dan untuk menghindari menjadi residivis.

2. Sanksi pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

²² Tegar Bagus Yoga Tama, Hadi Mahmudi, dan Dika Yudanto, "Unsur Pidana Dalam Permainan Slot Online Ditinjau Dari Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia", *Jurnal Bevending*, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Vol. 1, No. 5. 2023

Perjudian Online *Higgs Domino Island*

Dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, dijelaskan mengenai ancaman atau sanksi bagi pelaku permainan judi online *higgs domino island*. Berikut adalah bunyi Pasal 303 KUHP, yaitu: "dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun penjara atau dengan pidana denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah". Sedangkan dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi: "diancam dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda sebanyak sepuluh juta rupiah".

Dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mempunyai kandungan unsur perjudian berdasarkan Pasal 27 ayat (2) akan mendapatkan hukuman Penjara paling lama 6 tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

1. Sejarah Singkat Kota Dumai

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang berada di pesisir Pantai Timur Sumatera yang menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk didunia dan merupakan wilayah hinterland dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT)

dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Singapura (IMT-GT).

Semakin pesatnya pertumbuhan dan pembangunan Dumai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829) Tanggal 20 April 1999 Kota Administratif Dumai ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Pada awal terbentuknya, Kota Dumai terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur, dengan tiga belas (13) kelurahan dan sembilan (9) Desa dengan jumlah penduduk 15.669 jiwa dengan tingkat kepadatan 83.85 Jiwa/km².

2. Kondisi Geografis Kota Dumai

Lingkup wilayah Kota Dumai, daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas ± 204.674 (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar, wilayah perairan seluas ± 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar dan wilayah udara, serta wilayah dalam bumi. Secara geografis, Kota Dumai berada pada koordinat 101° 23' 37" - 101° 28' 13" Bujur Timur dan 1° 23' - 1° 24' 23" Lintang Utara. Kota Dumai memiliki luas wilayah sebesar wilayah 1.727,38 km²

B. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai

1. Gambaran Umum Polsek Bukit Kapur

Kepolisian Sektor yang kemudian di singkat polsek

adalah unsur pelaksanaan tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Adapun alamat dari Polsek Bukit Kapur terletak di jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, km.15. Saat ini Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai dipimpin oleh IPTU Irsanuddin Harahap, S.H.,M.H.

2. Visi dan Misi Polsek Bukit Kapur Kota Dumai

a. Visi

“Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya”.

b. Misi

“Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional,

transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika”.²³

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online *Higgs Domino Island* Oleh Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide yang ada di dalam hukum agar menjadi kenyataan dan dapat ditegakkan di dalam masyarakat. Penegakan hukum pada hakikatnya sebagai suatu usaha untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka menjadi upaya untuk meenggakkan kembali hukum tersebut.

Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, berjalannya hukum perjudian online sebagai alat kontrol sosial belum sempurna pada masyarakat. Dengan kata lain hukum perjudian online belum

berjalan dengan efektif.²⁴ Adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bripka Sopan Sembiring, perjudian online telah diatur dalam Pasal 303 KUHP ayat (1) yang mana di ancam dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebanyak 25 juta rupiah. Perjudian juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (2) dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda sebanyak satu miliar rupiah.

2. Faktor Penegak Hukum

Penyidik Polsek Bukit Kapur menjelaskan bahwa Hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya peran dari penegak hukum. Mengenai penegakan hukum perjudian online ini tidak hanya peran penegak hukum yang di perlukan, tetapi pemerintah juga harus ikut ambil peran. Saat ini pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs perjudian online yang dilakukan oleh Kementerian Ilmu Komunikasi dan Informatika. Namun masyarakat kita masih juga menemui celah untuk mengakses situs perjudian

²³ <https://dumaikota.go.id/satker/polsek-bukit-kapur>, diakses, tanggal 3 Juli 2023

²⁴ Delfi Aurelia Kuasa dan Febri Jaya, “Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 5, No. 2 Desember 2022, hlm. 356

tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan pribadi virtual atau yang dikenal dengan VPN.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Lembaga penegakan hukum akan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan terutama perjudian online, karena kejahatan ini melibatkan internet yang sulit dijangkau. Sarana pendukung dalam hal ini meliputi sumber daya manusia yang berkualitas atau berkompeten, alat yang mendukung dan lain-lain.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu melalui keikutsertaan masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Bentuk keikutsertaan masyarakat dalam penegakan hukum terletak pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui cara melibatkan masyarakat dalam pencegahan terjadinya tindak pidana perjudian online.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai tersebut menunjukkan tindakan mana yang baik dan mana yang buruk. Faktor kebudayaan ini berkaitan erat dengan masyarakat, karena kebudayaan itu dilahirkan oleh masyarakat

dan dibawa oleh masyarakat. Tindakan perjudian merupakan tindakan yang menyimpang dan melanggar moral sosial, agama, dan norma-norma dimasyarakat.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online *Higgs Domino Island* di Wilayah Hukum Polsek Bukit Kapur

1. Hambatan Pada Faktor Penegak Hukum

Kurangnya pemahaman personil kepolisian dalam bidang penanganan kasus yang berhubungan dengan *cyber crime*, yang menyebabkan kurangnya antisipasi untuk mencegah terjadinya perjudian secara online ini. Faktor sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam penegakan hukum judi online, kurangnya pemahaman tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja dari pihak kepolisian.

2. Hambatan Pada Faktor Sarana dan Prasarana

Penyidik Polsek Bukit Kapur menjelaskan bahwa Sarana dan prasarana merupakan faktor utama untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, apabila memiliki kemampuan yang baik tapi tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, maka kemampuan bekerja juga tidak akan optimal. Hal ini mengingat bahwa kejahatan tindak pidana perjudian online menggunakan fasilitas teknologi dan internet untuk memainkannya, hal tersebut tidak sejalan dengan

tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian

3. Sulitnya Mengumpulkan Alat Bukti

Dalam kasus perjudian online, hambatan yang banyak ditemui oleh penyidik kepolisian adalah dalam mengumpulkan alat bukti. Mengenai alat bukti dari judi online ini sangat sulit ditemukan, karena pelaku bisa dengan mudahnya menghilangkan alat bukti. Maka dari itu untuk menangkap pelaku judi online ini tidak bisa dilakukan dengan mudah tanpa adanya bantuan laporan masyarakat atau dengan cara operasi tangkap tangan.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat

Minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perjudian online menunjukkan kurangnya pengendalian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ikut turut serta nya peran masyarakat sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan dari awal penegakan hukum. Pihak kepolisian kedepannya sangat mengharapkan peran aktif dari masyarakat untuk bekerjasama dalam memberantas judi online.

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Kepolisian Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online *Higgs Domino Island* di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai

1. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di dalam masyarakat atau pemuka masyarakat untuk sama-sama memberantas penyakit judi online dengan melakukan sosialisasi bahwa perjudian online dilarang oleh undang-undang;

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perjudian online, dan untuk tidak takut agar melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui terjadinya tindak pidana perjudian online;

3. Melakukan patroli di tempat-tempat yang terindikasi untuk berkumpulnya para pemain judi;

4. Memberikan pelatihan kepada personil Polsek Bukit Kapur Kota Dumai mengenai penanganan kasus yang berhubungan dengan *cyber crime*;

5. Memberikan penindakan tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku judi online.

**BAB V
PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai belum sepenuhnya efektif, hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

judi online *higgs domino island* yang ditemui oleh aparat kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai adalah: Keterbatasan pengetahuan oleh aparat penegak hukum mengenai kejahatan yang berkaitan dengan *cyber crime*. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja aparat kepolisian. Sulitnya dalam pengumpulan alat bukti. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum

3. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Sektor Bukit Kapur Kota Dumai untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum perjudian online *higgs domino island* yaitu melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di dalam masyarakat, melakukan sosialisasi, melakukan patroli, memberikan pelatihan kepada personil polsek bukit kapur, melakukan penindakan tegas kepada pelaku judi online

B. Saran

1. Diperlukan kolaborasi antara pihak polisi dengan masyarakat dalam usaha-usaha pencegahan dan penyebaran informasi di lingkungan masyarakat. Serta diharapkan kerjasama yang lebih kuat antar instansi pemerintah maupun non pemerintah dalam memberantas kejahatan perjudian melalui internet.
2. Untuk aparat penegak hukum terkait khususnya kepolisian, harus segera melakukan tindakan yang lebih tegas dan menyeluruh sebagai upaya perbaikan terhadap

segala bentuk kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian, guna memaksimalkan pelayanan. Masyarakat juga hendaknya turut aktif berperan dalam memberantas perjudian online yang terjadi dilingkungannya dengan cara mengadukan hal-hal yang terkait kepada pihak kepolisian, agar lingkungan bersih dari kegiatan yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda. Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: KENCANA
- Barkatullah, Abdul. Halim. 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media
- Efendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hatta, Muhammad. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Hiariej. O.S. Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka
- Kartono, Kartini. 2021. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: P.T.ALUMNI
- Rosida, Nikmah. 2016. *Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok, PT. RajaGrafindo Persada
- Sulistiyarini, Indah. Ria dan Nur Pratiwi Novianti. 2012. *Wawancara: Sebuah Metode Efektif Untuk Memahami Perilaku Manusia*. Bandung: CV. Karya Putra Darwati
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

B. Jurnal

- Delfi Aurelia Kuasa dan Febri Jaya. 2022. Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2
- Haryadi, Wahyu. Tris. 2019. Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2
- Rumbay. Imelda. Sonia. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online. *Lex Privatum*. Fakultas Hukum

- Universitas Sam Ratulangi, Vol. XI, No. 5
- Simbolon, Jupalman. Welly. 2022. Aplikasi Game Online High Domino Island di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Patologi Sosial. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 5, No. 1
- Tegar Bagus Yoga Tama, et al. 2023. Unsur Pidana Dalam Permainan Slot Online Ditinjau Dari Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia. *Jurnal Bevendinging*. Fakultas Hukum Universitas Iskam Batik Surakarta. Vol.1, No.5

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik